

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama adalah elemen fundamental hidup dari kehidupan manusia, Indonesia memang mengakui dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Namun Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara Pancasila, dimana semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan ada jaminan mengenai kebebasan beragama. Agama berkedudukan terhormat disertai berbagai kebijakan pengembangan agama tersebut. Dengan demikian kepentingan agama perlu dilindungi. Inilah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi agama sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbenturan antara kepentingan kaidah pribadi dengan kaidah antar pribadi, yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itulah, dibutuhkan kaidah hukum dalam bentuk peraturan untuk mengatur masyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sosial. Sebab, manusia tidak akan dapat hidup hanya dengan kaidah-kaidah pribadi tanpa diatur juga oleh kaidah antar pribadi.

Sebenarnya, perselisihan antar agama bukan hal yang baru khususnya, di Indonesia sendiri. Perang antar agama, membantai penganut agama tertentu, merusak dan membakar rumah ibadah, bukanlah hal yang tak mungkin untuk ejek-mengejek agama. Kasus penodaan dan penistaan agama sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Eyang Subur yang menodai agama Islam dengan beristri lebih dari empat, memodifikasi cara shalat Lia Aminuddin alias Lia Eden yang mengaku sebagai nabi, Yusron Roy yang mengajarkan shalat 2 bahasa serta kasus Ahmad Mossadeq guru spiritual dengan kelompoknya yang bernama GAFATAR, yang keberadaannya

meresahkan berbagai pihak. Munculnya kelompok ini sebagai fenomena sosial keagamaan yang mengguncang sebagian besar umat beragama.

Problem kasus penistaan agama adalah persoalan yang telah lama muncul di Indonesia. Pada aksi demonstrasi 4 November 2016 berbagai elemen masyarakat muslim turun ke jalan karena isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Peristiwa aksi demonstrasi massa umat islam yang dipimpin oleh FPI dan beberapa ormas islam yang berlandaskan fatwa MUI. Demo kali ini merupakan aksi yang berkaitan dengan tuntutan umat islam yang menuntut keadilan. Dengan tema Aksi Bela Islam yang berlangsung berjilid-jilid, menjadi bukti bagaimana umat islam menuangkan kemarahannya terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), yang diduga menistakan agama islam. Konflik bermula ketika tafsir pidatonya yang berhubungan dengan Al-Quran surah Al-Maedah ayat 51, pada pidatonya tersebut di Belitung Timur. Pidato tersebut telah menempatkan dirinya sebagai tertuduh tunggal atas dugaan penodaan dan penistaan agama islam karena telah melanggar pasal 156a KUHP. Pidato yang telah memantik kemarahan luar biasa umat islam tersebut tidak terlepas dari motif politik dan kekuasaan.

Pidato Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) tersebut dieksploitasi sedemikian rupa dengan nada SARA karena Ahok berasal dari non muslim, untuk mengkapitalisasi rasa kebencian kepada Ahok dalam perspektif etnis dan agama. Ketidaksukaan yang bermanifestasi menjadi kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) menjadi amunisi yang mematikan nalar sehat. Sugesti emosi publik pun dimuntahkan penodaan dan penistaan agama, menjadi senjata paling ampuh untuk mematikan langkah maju eksistensi di Pilgub Jakarta 2017. Selain itu, pasca demo besar-besaran tersebut isu yang berkembang pun semakin liar, terutama isu tunggang menunggangi nuansa politis yang semakin kentara. Para demonstran yang mulanya berdemo dengan lancar dan aman berubah menjadi rusuh, ketika presiden Jokowi tidak mau menemui masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, untuk menuntut Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pernyataan

Presiden Jokowi seakan menjadi legitimasi kebenaran isu tersebut yang mengindikasikan adanya aktor-aktor politik yang sengaja menunggangi aksi tersebut. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menjadi *trend-setter* sebagai salah satu dari aktor-aktor politik yang disinggung Presiden Jokowi kemudian. Kalau dugaan tersebut ternyata benar, tentu erat kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Ini adalah bagian dari taktik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan calon yang diusungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ini bukan hanya soal hubungan ayah-anak, tapi soal memberikan keyakinan kepada AHY bahwa ia masih berada di jalur kemenangan. Pengorbannya berhenti dari anggota TNI, harus dibayar mahal dengan kemenangan.

Momentum ketika Ahok yang paling ditakuti tergelincir dengan kalimat yang sensitif, yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi isu penistaan agama. Isu pun bergulir, sukses luar biasa. Melahirkan demo terbesar sepanjang sejarah bangsa ini, hanya untuk menghancurkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Demo yang awalnya menuntut proses hukum, berubah menjadi tuntutan agar Ahok ditangkap dan dtersangkakan. Meskipun secara hukum status tersangka tidak secara otomatis menggugurkan Ahok dalam kontestan Pilkada, tetapi dengan sekali mengatakan “untuk apa pilih Ahok yang tersangka?” urusan selesai, lebih mudah menjatuhkan. Ini tidak bisa hanya dipandang sebagai taktik untuk pilkada DKI Jakarta semata, tapi jauh lebih dari itu, ada kepentingan untuk kembali menguasai negeri ini. Sebelumnya sosok Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) memang menjadi pro-kontra di tengah masyarakat DKI Jakarta.

Setelah terpilihnya Jokowi sebagai Presiden yang menyisakan kekosongan pada kursi Gubernur DKI Jakarta, karena secara otomatis Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) akan menggantikan Jokowi sebagai Gubernur. Isu kemungkinan naiknya Ahok menjadi Gubernur cukup memanas, berbagai unjuk rasa menolak pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan gabungan ormas islam, khususnya FPI bukan tanpa alasan. Penolakan tersebut didasarkan atas alasan

perbedaan keyakinan dalam hal ini adalah agama. Alasan ini bisa dikategorikan menyinggung SARA (Suku, Agama dan Ras) yang sangat sensitif dan berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketegasan Ahok dalam memimpin Jakarta sering diartikan negatif oleh sebagian orang hanya demi menjatuhkannya. Namun dalam beritanya sosok Ahok diberitakan menanggapi dengan santai dan mau memaafkan. Pemberitaan mengenai Ahok merupakan pemberitaan positif melihat dirinya diposisikan sebagai pihak korban dalam kontroversi SARA kali ini. Faktor lain juga disebabkan label *media darling* yang melekat pada Ahok. *Media darling* merupakan sosok politisi yang dikagumi oleh jurnalis, contohnya tokoh seperti Jimmy Carter, Colin Powell, dan Nelson Mandela. Status *media darling* merupakan hasil pilihan dari media massa sendiri meski *spin-doctors* (manager kampanye yang dibayar untuk melakukan propaganda dan menaikkan citra seorang tokoh) juga turut ambil bagian di dalam prosesnya.

Isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dikonstruksi secara beragam oleh media massa. Ada yang mendukung kelompok tertentu, ada yang mencoba berada di tengah-tengah dan ada pula yang menolak. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat dan dipublikasikan oleh media massa, bukanlah suatu peristiwa yang biasa. Peristiwa tersebut tentu dipilih berdasarkan pemahaman *internal* maupun *eksternal* wartawan sehingga bisa menjadi berita. Fenomena ini bisa terjadi antara lain karena wartawan memiliki *frame* yang berbeda dalam melihat sebuah realitas. Pekerjaan utama wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Dengan demikian, mereka selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (*news*), karangan khas (*feature*), atau gabungan keduanya (*news feature*) (Sobur, 2015:88).

Disebabkan karena sifat dan faktanya bahwa pekerja media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*) (Sobur, 2015:88). Realitas berita yang ditampilkan oleh media memberikan gambaran tentang

sikap sebuah media massa. Dalam merekonstruksi berita tersebut, masing-masing media menseleksi isu-isu tertentu dan menekankan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu dari realitas. Dari cara media menseleksi isu dan menonjolkan aspek-aspek tertentu berita, akan terlihat bagaimana tendensi atau kecenderungan media tersebut terhadap berita yang mereka buat. Media dalam memandang realitas isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), memiliki perspektif yang berbeda-beda satu sama lain. Masing-masing media akan mengkonstruksi realitas tersebut dalam suatu berita dengan konstruksi yang berbeda-beda. Hal ini karena perspektif wartawan dan ideologi media akan ikut masuk dalam proses penulisan berita. Pesan yang terdapat dalam berita tersebut memiliki kekuatan untuk mencuri perhatian publik yang akan menjadi salah satu acuan publik dalam bersikap, bertindak, dan memihak terhadap suatu fenomena. Isu media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya.

Pesan yang disampaikan oleh media massa melalui majalah, koran, tabloid, buku, televisi, radio, internet dan film diterima secara serempak oleh khalayak luas yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan juta. Media massa yang baik seharusnya menjalankan fungsi yang sama dengan komunikasi massa seperti yang dikemukakan oleh Harold Laswell, diantaranya untuk menginformasikan (*to inform*), untuk mendidik (*to educate*), dan untuk menghibur (*to entertain*). Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial (*social control*) baik pada perilaku publik maupun pada penguasa (Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang pers). Media massa sebagai perpanjangan indra khalayak untuk mengetahui banyak peristiwa di tempat

yang terpisah. Jarak dan waktu juga memiliki fungsi-fungsi yang dimanfaatkan, sesuai dengan keinginan pemilik dan pihak-pihak yang berkuasa atas media tersebut. Salah satu pemanfaatan media massa adalah sebagai sarana komunikasi politik.

Komunikasi politik di media massa erat kaitannya dengan opini publik. Opini publik yaitu upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai suatu masalah politik atau aktor politik. Dalam komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam usaha memperengaruhi individu terhadap terpaan berita yang diterimanya. Bentuk dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang di dalamnya terdapat simbol-simbol politik Hamad 2004 (Dalam Mawardi 2012:2). Oleh karena itu media massa menjadi saluran yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi politik, bahkan media massa dilihat sebagai alat yang mampu menjustifikasi terhadap realita sosial yang terjadi di masyarakat.

Masuknya pemimpin media massa ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pemberitaan-pemberitaan politik yang di muat di media massa baik media cetak, elektronik, maupun media *online*. Penyajian berita dan konstruksi dari realitas yang ada mulai dibuat dengan melihat aspek-aspek yang ditonjolkan media. Untuk mempermudah khalayak, mengingat hal-hal tertentu yang disajikan menonjol oleh media. Dalam penonjolan aspek-aspek tertentu tidak luput dari sudut pandang wartawan dalam memaparkan berita. Selain itu juga ada unsur-unsur yang dihilangkan agar membuat khalayak lupa akan berita yang tidak dianggap penting dan tidak diperlihatkan (Eriyanto, 2009:69). Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak diantara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut.

Pemberitaan mengenai kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) memang menjadi hal yang menarik dan sangatlah ditunggu-tunggu. Kajian isu penistaan agama menjadi menarik

karena bisa disebut sebagai fenomena percontohan bagaimana isu SARA berbentuk dan bekerja di ruang publik dengan sangat cepat. Karena peneliti kali ini ingin mengupas, bagaimana framing dalam kasus ini. Sebagai berita yang selalu ditunggu-tunggu kemunculannya diberbagai media, termasuk Surat Kabar Harian Kompas dan Republika. Peneliti ingin membandingkan apa yang ditampilkan di Surat Kabar Harian Kompas dengan Republika.

Pemilihan Harian Republika ini dipilih didasarkan bahwa Harian ini dianggap mewakili aspirasi intelektual Islam. Dilihat dari awal berdirinya dilakukan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sehingga terlihat sebagai surat kabar islam dengan memiliki ideologi kebangsaan, kerakyatan dan keislaman. Sedangkan, Harian Kompas didasarkan pada asumsi dari representasi insan pers yang pluralis dan nasionalis. Walaupun dilihat dari sejarah berdirinya Kompas dirintis dan didirikan oleh partai Katolik, sehingga dapat diasumsikan mewakili katolik. Dengan adanya perbedaan ideologi tersebut, tentunya dalam pengemasan kasus pemberitaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), akan berbeda sehingga menarik untuk diteliti.

Selain itu, Harian Kompas dan Republika merupakan surat kabar yang menorehkan prestasi membanggakan di Indonesia maupun Internasional. Kompas pernah berhasil meraih 3 penghargaan Asian Digital Media Awards 2011 dari WAN IFRA yang diumumkan di Hongkong pada 24 November 2011 penghargaan yang diraih adalah 1 *gold*, 1 *silveraward*, dan 1 *bronzeaward*, Sedangkan Republika pernah meraih penghargaan dalam ajang IPMA, InMA, IYRA, dan ISPRIMA 2016 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS). Salah satu penghargaan yang diperoleh adalah Gold Winner kategori The Best Nasional NewsPaper IPMA 2016. Kedua media tersebut telah membentangkan sayapnya di dunia permediaan surat kabar di Indonesia. Maka peneliti akan menganalisa lebih jauh tentang bagaimana kedua media tersebut membingkai berita mengenai kasus dugaan penistaan agama oleh

Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada Surat Kabar Harian Kompas dan Republika.

Dengan meneliti pemberitaan sosok Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) terkait kontroversi SARA dan kasus penistaan agama, maka akan terlihat pembingkai atau framing yang digunakan media untuk menonjolkan dan memberikan penekanan aspek tertentu sesuai dengan kepentingan media. Untuk membedah terkait isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Model analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdong Pan dan Gerald M. Kosicki menjadi pisau bedah yang tepat karena mereka mengoprasionalkan empat dimensi struktural teks berita: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dengan pola tersebut bisa diketahui *frame* dari masing-masing media yang ingin diteliti. Model tersebut dirasa banyak peneliti paling sistematis dan praktis karena kecenderungan media akan bisa dilihat dari keempat dimensi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Surat Kabar Harian Kompas dan Republika mengkonstruksikan realitas pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana Surat Kabar Harian Kompas dan Republika mengkonstruksikan realitas pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembingkai terhadap pemberitaan isu kasus dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini adalah penggambaran bagaimana pembingkai berita dilakukan media dalam memberitakan sebuah peristiwa pada khalayak. Hasil penelitian diharapkan dapat membawa pencerahan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan berita.

1.4.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada publik tentang pembingkai berita yang dilakukan media massa, agar publik tidak dengan begitu saja mengonsumsi berita tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih berita, serta memberikan penilaian kritis terhadap berita yang disampaikan oleh media